



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Canberra, Sydney, Australia dilaksanakan atas dasar Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PW.01/4702/DPR RI/VI/2010, sehubungan dengan adanya beberapa hal yang mengganjal hubungan bilateral antara kedua negara. Duta Besar RI di Canberra dan Kepala Konsulat Jenderal RI di Sydney beserta jajarannya di harapkan secara bertahap mampu mencairkan ganjalan di maksud untuk kepentingan Indonesia. Namun nampaknya perlu mendapat dukungan peningkatan hubungan melalui kerjasama antar Parlemen, selain perbaikan internal kedutaan Besar dan Konsulat tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kunjungan adalah :

1. Melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program Pemerintah.
2. Meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dengan negara-negara sahabat melalui pendekatan *Parliament to Parliament*.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan Delegasi Komisi I DPR RI ke Australia terlampir.
(lampiran 1)

D. ACARA KUNJUNGAN

(lampiran 2)

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN

2.1. GAMBARAN UMUM

Ibukota	: Canberra
Sistem pemerintahan	: Federal, dengan 6 negara bagian (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Tasmania, dan Western Australia), 2 Territory (Australian Capital Territory dan Northern Territory).
Jumlah Penduduk	: 21.468.700 jiwa
Luas wilayah daratan	: 7.692 km ² , terbesar keenam di dunia
GDP	: GDP 2008 (IMF Forecast) : US\$ 1.069.3 milyar, GDP perkapita 2008 : US\$ 50.150, Inflasi (200) : 4.8%

2.2. SISTEM POLITIK DAN PEMERINTAHAN

1. Australia memiliki nama resminya *Commonwealth of Australia* dengan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, yang diwakili oleh Gubernur-Jenderal dan saat ini di jabat oleh H.E. Ms. Quentin Bryce AC. Kepala Pemerintah Australia adalah Perdana Menteri.
2. *Commonwealth of Australia* terbentuk tahun 1901. Australia menganut demokrasi liberal dengan sistem parlementer, dimana Perdana Menteri dan para menteri merupakan anggota Parlemen dari Partai pemenang pemilu. Parlemen di Australia menganut sistem bikameral, yaitu House Representatives sejumlah 150 orang dan Anggota Senat sejumlah 76 Senator.
3. Di bawah Partai Buruh, pemerintahan baru Australia mulai mengambil langkah-langkah kebijakan di berbagai bidang sesuai dengan *platform* yang dimajukan saat kampanye. Salah satu langkah berani yang diambil PM Kevin Rudd dalam kerangka politik domestik adalah permintaan maaf kepada penduduk asli aborigin atas kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif di masa lampau, meskipun masih perlu ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan nyata.
4. Dengan kemenangan Partai Buruh pada pemilu pada pemilu November 2007, kebijakan politik luar negeri Australia mengedepankan kebijakan yang bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu : (1) aliansi dengan US; (2) meningkatkan pendekatan (*engagement*) dengan kawasan Asia-Pasifik; dan (3) kerjasama dalam kerangka multilateral/PBB. Dengan demikian komitmen untuk meningkatkan hubungan Australia dengan kawasan Asia-Pasifik memasuki babak baru termasuk peningkatan hubungan lebih jauh dengan Indonesia, juga dengan memperhatikan munculnya China dan India sebagai

powerhouse baru, namun dengan tetap mempertahankan kedekatannya dengan Amerika Serikat.

5. Kebijakan pertahanan Australia sesuai dengan buku putih pertahanan "*Defending Australia in the Asia Pacific Century : Force 2030*" yang dikeluarkan 2 Mei 2009 menyatakan kepentingan dasar pertahanan Australia adalah mempertahankan Australia dari serangan bersenjata baik dari aktor negara maupun non-negara. Untuk itu, Australia diharapkan dapat (a) *act independently*; (b) *lead military coalitions* dan (c) *make tailored contribution*. Dalam kaitan tersebut, tugas utama angkatan bersenjata Australia ialah (a) menangkal dan mengalahkan serangan bersenjata ke Australia; (b) berkontribusi bagi stabilitas dan keamanan di Pasifik Selatan dan (c) berkontribusi terhadap darurat militer di Asia Pasifik, dan (d) darurat militer di belahan dunia lainnya.
6. Dalam menyikapi isu keamanan, fokus Australia adalah mengamankan integritas perbatasan dan wilayah Australia, menjamin kedaulatan politik, menjaga kekuatan ekonomi yang berjangka panjang, melindungi segenap warga Australia dan kepentingannya di manapun mereka berada, dan menjamin agar lingkungan agar lingkungan internasional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, tetap stabil, damai dan makmur.

2.3. PERTEMUAN-PERTEMUAN DI CANBERRA

1. Pertemuan dengan Senator The Hon. Stephen Conroy, Minister for Broadband, Communication, dan the Digital Economy, tanggal 21 Juni 2010

- a) Pada pertemuan tersebut, Senator Stephen Conroy menjelaskan pengalaman dan pengembangan teknologi informatika dan penyiaran di Australia. Beliau mengikuti perkembangan isu-isu terkait content internet di Indonesia, dan memaklumi kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki UU terkait *content internet*.
- b) Ketua Delegasi Komisi I dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa bagi Indonesia, kebutuhan pengaturan content internet tidak dimaksudkan untuk memberangus kebebasan berpendapat masyarakat, namun lebih mengedepankan perlindungan generasi muda di Indonesia atas substansi dan muatan negatif internet. Selain itu, delegasi juga melakukan *sharing* informasi dan pengalaman dari pemerintah Australia dalam mendukung dan mengembangkan perusahaan televisi dan radio publik.
- c) Merespon pertanyaan dari delegasi Komisi I DPR RI, Menteri Conroy menginformasikan saat ini Australia sudah memiliki sistem rating dalam hal tayangan-tayangan di media cetak dan televisi, dengan demikian dapat menjadi panduan bagi orang tua dan masyarakat luas dalam memberikan

perlindungan bagi generasi muda. Permasalahan ini bukan hanya bagi pemerintah Australia tapi juga negara-negara lain termasuk Indonesia dalam hal bagaimana mengawasi dan menyediakan aturan bagi *content internet* namun disisi lain tetap memberikan ruang kreatifitas bagi para generasi muda. Kedepan, kedua pihak memaklumi bahwa perbedaan sistem dan budaya juga berpengaruh atas aturan-aturan pengawasan dan filter media serta internet, untuk itu kedua belah pihak tetap saling memaklumi dan menghormati peraturan dari masing-masing negara dalam mengawasi penggunaan internet.

- d) Lebih lanjut Menteri Conroy menyampaikan bahwa saat ini Australia telah memiliki *Broadband Network (NBN)*, dimana perusahaan pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan infrastruktur internet dan telekomunikasi di Australia. Melalui NBN berupaya menghubungkan hampir 90% perumahan, sekolah dan perkantoran dengan layanan internet yang lebih cepat dengan kombinasi penggunaan teknologi satelit dan serat optik. Selanjutnya dalam mengantisipasi menjamurnya kebudayaan asing yang mengancam kebudayaan dan tayangan lokal, Pemerintah Australia terus mendorong pengembangan perusahaan televisi publik yaitu ABC dan SBS guna tetap menyediakan tayangan lokal yang bermutu melalui dukungan dana serta depolitisasi kedua media tersebut. Australia menyatakan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut kerjasama dan kemitraan yang dapat dilakukan antar pemerintah maupun melalui TVRI dan RRI dengan mitranya di Australia yakni ABC dan SBS.

2. Pertemuan dengan the Hon. Greg Combet, MP., Minister for Defense Materiel and Science, tanggal 21 Juni 2010

- a) Dalam pertemuan ini kedua pihak mengapresiasi kerjasama pertahanan dan keamanan kedua negara yang di payungi melalui *Lombok Treaty* selain perkembangan industri pertahanan kedua negara. Komisi I DPR RI menyampaikan bahwa kebutuhan akan peralatan militer sangat penting namun saat ini Indonesia masih menyesuaikan dengan *budget* dan fokus pada pemeliharaan alat-alat militer yang telah ada. Disampaikan pula keinginan Indonesia untuk menjajagi peluang kerjasama industri pertahanan dan mekanisme pengadaan peralatan militer termasuk dukungan riset dan teknologi pertahanan mandiri serta pelibatan pihak swasta dalam pengadaan dan pemeliharaan peralatan militer yang dikelola secara benar.
- b) Menanggapi hal tersebut Menteri Combet menyambut baik keinginan Indonesia dan memberikan dukungan bagi peningkatan industri pertahanan Indonesia serta memahami kepentingan strategis Indonesia untuk mengembangkan

secara nasional produksi peralatan militernya. Selain itu pula, disampaikan bahwa pemerintah Australia saat ini masih mengandalkan kemampuan pemerintah dan sangat membatasi peran swasta dalam pengadaan peralatan militer. Australia menyadari peranan swasta akan memberikan pengaruh positif dalam pengadaan peralatan militer khususnya guna meningkatkan kompetensi dan menekan harga. Untuk itu dalam hal pengadaan peralatan militer, saat ini selain mengedepankan kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah Australia juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan peralatan militer selalu mengedepankan aspek alih teknologi dan pemeliharaan *spare part*.

- c) Selanjutnya menjawab pertanyaan Komisi I DPR mengenai pengalaman Australia terkait hak pilih dan keikursertaan tentara dalam pemilu di Australia, disampaikan oleh Menteri Combet bahwa saat ini seluruh personil militer Australia memiliki hak pilih dalam pemilu, setara dengan warga negara Australia lainnya. Khusus keterlibatan militer yang mencalonkan diri dalam pemilu, merupakan hal yang wajar, namun yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari dinas militernya.

3. Pertemuan dengan Para Akademisi dan Indonesianis dari Australian National University (ANU), tanggal 21 Juni 2010

- a) Pada pertemuan yang dipandu oleh peneliti senior mengenai Indonesia, Edward Aspinall, membicarakan mengenai isu Papua, perlindungan nelayan, dan awak kapal Indonesia di Australia, tindak lanjut kunjungan Presiden RI, pengembangan studi dan bahasa Indonesia, serta mengenai *travel advisory*. Dalam hal ini, Delegasi Komisi I DPR dalam kesempatan ini menanyakan mengenai perhatian masyarakat Australia dan beberapa anggota parlemen Australia terkait masalah Papua.
- b) Mengenai hal tersebut, para akademisi menyampaikan bahwa hal tersebut hanya merupakan *concern* beberapa pihak di Australia, dan mayoritas komponen bangsa Australia pada umumnya mendukung serta mengapresiasi usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam mendorong otonomi khusus di Papua. Selain itu diharapkan agar dukungan maupun *concern* dari beberapa (3-4 orang MP dari *Green Party*) yang masih aktif menjadikan isu Papua tidak menjadi suatu permasalahan, apalagi dukungan terhadap LSM yang berkaitan dengan gerakan kemerdekaan Papua semakin mengecil dan sudah tidak menjadi isu yang menarik bagi Australia. Hal lain yang dirasakan peneliti ANU adalah krisis studi beasiswa untuk Indonesia dimana pendanaannya semakin berkurang, sementara terjadi peningkatan beasiswa

untuk Korea Selatan di tahun mendatang, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap jumlah peminat studi tentang Indonesia ditahun mendatang akan berkurang.

- c) Selanjutnya, salah satu Indonesianis menilai penerapan *travel advisory* telah menjadi *non-tariff barrier* bagi peningkatan perdagangan kedua negara. Selain itu, adanya pandangan yang disampaikan pihak akademisi atas wacana hak pilih militer di Indonesia pada pemilu 2014 mendatang, yang dipandang positif. Namun demikian, sebelum wacana tersebut diwujudkan perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat keraguan dan kontroversi berkepanjangan.
- d) Komisi I DPR RI juga menjelaskan atas pertanyaan dari peneliti ANU mengenai RUU Keamanan Nasional khususnya peran Militer dalam penanganan masalah terorisme, dimana peran militer dibatasi dalam penanganan masalah terorisme, yakni hanya membantu tugas Polri bila dirasakan sangat dibutuhkan, khususnya dalam mendukung serta sesuai permintaan unit detasemen antiteror Polri.
- e) Hal lain, yang disampaikan Komisi I DPR RI mengenai para nelayan Indonesia yang ditangkap dan dipenjara di Australia karena dianggap terlibat *people smuggling*, yang selanjutnya para akademisi ANU mendukung perlunya reconsiderasi masalah ini oleh pemerintah Australia.

4. Pertemuan dengan Warren King, Deputy Chief Executive Officer Defence Material Organization (DMO), tanggal 22 Juni 2010

- a) Dalam pertemuan ini dibahas antara lain mengenai pengalaman Australia dalam pengadaan peralatan militer. Deputy King menjelaskan DMO selalu mengedepankan kompetensi antara angkatan bersenjata, khususnya terkait pengadaan dan pengembangan peralatan militernya. Salah satu fungsi dan tugas DMO disini yakni memberikan saran dan masukan kepada Menteri Pertahanan mengenai peralatan militer yang menjadi kebutuhan masing-masing unit angkatan, sebelum Menteri Pertahanan dan DMO mengajukan anggaran pengadaan militer 3-4 tahun ke depan kepada parlemen Australia. Parlemen Australia sendiri hanya bertugas memeriksa, mempelajari, dan menyetujui anggaran yang diajukan dan tidak terlibat lebih jauh mengenai jenis peralatan dan perusahaan yang terlibat dalam pengadaan tersebut. Namun pelaksanaan anggaran yang telah disetujui oleh parlemen, dilaksanakan secara efektif, benar dan *accountable* oleh pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dalam hal pengadaan peralatan militer.
- b) Dijelaskan juga dalam melakukan pengadaan kebutuhan peralatan militer, DMO mengundang beberapa perusahaan

untuk ikut serta dalam mekanisme bidding tender pengadaan (*transparan&fair*). Informasi mengenai perusahaan dan peralatan serta harga penawaran akan disampaikan ke Menteri Pertahanan dan *National Security Committee* untuk diputuskan. DMO hanya bertugas memberikan masukan, laporan dan rekomendasi namun tidak bertugas sebagai pengambil keputusan.

- c) Selanjutnya menjawab pertanyaan dari delegasi Komisi I DPR, DMO menjelaskan dalam setiap pengadaan peralatan militernya selalu memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta menyediakan jaminan adanya alih teknologi dan ketersediaan suku cadang dalam kontrak kerja mereka. Dalam kesempatan ini, Ketua Delegasi juga menyerahkan spesifikasi *armored car Anoa* produksi nasional Indonesia.

5. Pertemuan dalam working lunch dengan Mr. Jim Turnour, MP., Chair dan Senator Alan Eggleston, Deputy Chair Friendship Group on Indonesia dan beberapa anggota Parlemen Australia, tanggal 22 Juni 2010

- a) Pada pertemuan *working lunch* ini, Ketua delegasi Komisi I DPR menyampaikan apresiasinya atas hubungan baik Indonesia - Australia serta kerjasama antara parlemen kedua negara yang perlu selalu ditingkatkan khususnya dalam mendukung kerjasama di tingkat pemerintah kedua negara. Disampaikan juga beberapa isu yang kiranya perlu mendapatkan perhatian parlemen Australia antara lain mengenai perkembangan kerjasama ekstradisi, penyelundupan manusia khususnya nasib nelayan Indonesia yang masih ditahan di beberapa penjara di Australia, serta *travel advisory* yang masih menghambat hubungan *people to people* bagi kedua negara.
- b) Setelah *working lunch*, delegasi Komisi I DPR berkesempatan mendengar sidang parlemen (*question time*) di *House of Representatives* dan di Senat Australia.

6. Pertemuan dengan Mr. Harry Jenkins, MP, Speaker of the House dan Senator the John Hogg, President of the Senate, tanggal 22 Juni 2010

- a) Delegasi Komisi I dalam pertemuan ini, meminta Australia atas isu-isu yang menjadi kepentingan Indonesia seperti masalah perlindungan WNI yang ditahan di Australia karena diduga terlibat penyelundupan manusia (*people smuggling*) yang jumlahnya saat ini sudah lebih dari 300 jiwa, ironinya para nelayan tersebut tidak memahami tentang undang-undang di Australia dikarenakan keterbelakangan pendidikan mereka, karenanya diharapkan adanya reconsiderasi terhadap hukuman yang dijatuhkan

- b) Baik *Speaker of the House* maupun *President of the Senate* menyatakan sangat paham dan berjanji akan memberikan perhatian atas isu-isu tersebut dalam kerangka pengelolaan hubungan yang lebih baik dengan Indonesia di masa mendatang. Ditegaskan bahwa hubungan dengan Indonesia sangat penting bagi Australia oleh karena itu didukung semangat bipartisan sehingga hubungan akan tetap kokoh terlepas dari siapa yang duduk memerintah di Canberra atau di Jakarta.

7. Pertemuan dengan Senator Michael Forshaw, *Chair* dan the Hon. David Hawker, MP., *Deputy Chair the Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defence, and Trade*, tanggal 22 Juni 2010

- a) Dalam pertemuan ini, delegasi Komisi I DPR menyampaikan bahwa sebagai tindaklanjut dari pernyataan Presiden RI di parlemen Australia 10 Maret 2010 yang menyatakan bahwa Indonesia diharapkan akan segera memiliki undang-undang yang mengatur penyelundupan manusia, saat ini ketentuan dimaksud sudah tercantum dalam draft RUU keimigrasian yang akan dibahas di DPR. Disampaikan juga mengenai *concern* Indonesia mengenai perkembangan permintaan ekstradisi oleh Pemerintah RI, kasus pencemaran minyak Montara di Laut Timor dan *travel advisory*.
- b) Menjawab pertanyaan dari anggota parlemen Australia, Mellisa Parke, MP mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma, Ketua Delegasi menjelaskan bahwa hal tersebut memang sudah menjadi perhatian oleh DPR namun saat ini masih banyak prioritas lain dalam prolegnas di DPR. Ditambahkan bahwa proses legislasi di DPR memerlukan waktu khususnya terkait mekanisme komisi dan antar komisi, pansus, dan paripurna, namun demikian seluruh legislasi di DPR RI sudah direncanakan terukur dalam program legislasi nasional.

8. Pertemuan dengan Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia, tanggal 22 Juni 2010

- a) Pertemuan ini membicarakan mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan kedua negara dengan tekanan agar Australia memberikan respon yang lebih cepat dan baik atas isu dimaksud. Isu yang dibahas antara lain masalah WNI yang terlibat penyelundupan manusia dan RUU anti penyelundupan manusia, dampak tumpahan minyak Montara, *travel advisory*, masalah narkoba yang dikaitkan dengan Bali Nine, ekstradisi, *transfer of sentenced persons*, dukungan bagi studi dan bahasa Indonesia, peningkatan *people-to-people* termasuk pembentukan *Australia Indonesia Leadership Dialogue*.

- b) Ketua Delegasi Komisi I menyampaikan keinginan untuk meminta agar Australia dapat menghapus atau setidaknya mengurangi *level advisory* karena sudah menyentuh *pride* Indonesia sebagai bangsa dan berdampak pada citra Indonesia secara keseluruhan. Lebih lanjut dengan ditandatanganinya *Arrangement on Consular Assistance and Notification* bagi kedua negara, diharapkan perlindungan WNI di Australia semakin cepat dan baik serta menghimbau agar ada solusi yang lebih manusiawi atas nelayan yang ditahan di Australia karena mereka bukanlah bagian dari sindikat namun hanya karena faktor ekonomi penyebabnya. Selain itu juga diharapkan Australia dapat memproses permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik Indonesia secara lebih cepat karena dalam 2 (dua) tahun terakhir Indonesia telah mengekstradisi 4 (empat) orang sementara dari Australia belum ada yang diekstradisi ke Indonesia dalam kasus recovery asset Bank Century. Juga delegasi meminta pemerintah Australia atas tumpahan minyak Montara yang berguna dalam menyusun langkah lebih lanjut yang dianggap tepat oleh Indonesia.
- c) Merespon permintaan dari delegasi, Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia akan menyampaikan perkembangannya melalui KBRI termasuk mengenai hasil *inquiry Montara* dan informasi terkini mengenai kasus Bali Nine khususnya Scott Rush.

9. Reception Makan Malam oleh Mr. Harry Jenkins, MP, *Speaker of the House of Representatives* & Senator the Hon. John Hogg, *President of the Senate*

- a) Dalam jamuan makan malam, Ketua Delegasi mengatakan bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berpenduduk mayoritas muslim menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini, lebih lanjut Komisi I berpendapat masalah tersebut sebagai *mother of old problem* dan sumber utama dari berkembangnya terorisme di dunia. Dalam hal ini, *Speaker Parlemen Australia* turut prihatin atas permasalahan tersebut serta mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah.

10. Kunjungan Tim Komisi I DPR RI ke kantor KBRI Canberra, tanggal 23 Juni 2010

- a) Kunjungan yang dilakukan Tim Komisi I DPR RI ke Kantor KBRI Canberra dilaksanakan sebelum berangkat menuju Sydney pada pagi hari, dimana Tim Komisi I menyimpulkan beberapa hal yakni kondisi KBRI yang kurang baik dilihat

- dari aspek kebersihan ruangan kerja, plafon, gudang penyimpanan data, barang, dan dokumen lainnya.
- b) Dengan realitas tersebut, tentu kedepan perlu adanya dukungan penambahan anggaran untuk KBRI di Canberra, Australia.

2.4. PERTEMUAN-PERTEMUAN DI SYDNEY

1. Pertemuan dengan Mr. Murray Green (Dir. ABC International) dan Mr. Bruce Dover (*Chief Executive Australia Network Television*), Mr. Dean Leith (*Acting State Directing NSW*), tanggal 22 Juni 2010

- a) Diawali dengan peninjauan fasilitas ABC yang relevan bagi pengembangan TVRI ke depan, dalam pertemuan dengan *Chairman, board, Chief Executive Australia Network Television*, Direktur Internasional ABC melakukan tukar pandangan mengenai kebijakan, program, pengelolaan, personil, perbandingan, sistem anggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban antara TVRI dan ABC.
- b) Dikatakan oleh pihak ABC bahwa pengembangan publik *broadcasting* sangat penting dalam negara yang luas dan majemuk seperti Indonesia agar tetap dapat menjaga ke-Indonesia-an ditengah gempuran informasi dan kuatnya arus globalisasi.
- c) Lebih lanjut dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan kerjasama antar pemerintah maupun antar kedua televisi publik dalam pengembangan TVRI. ABC dengan didukung dana sebesar AUD\$ 1,2 milyar per tahun, mampu bersaing secara sehat dengan televisi swasta dengan member fokus pada isu-isu yang tidak *commercially viable* tetapi penting bagi suara dan cerita Australia seperti program terkait agama dan penduduk asli Australia. Jangkauan siaran ABC sampai pelosok Australia dan 44 negara termasuk Indonesia melalui Australia Network Television. Program yang dibuat harus benar bermanfaat dan dikemas secara baik sehingga menarik bagi pemirsa karena kekuatan ABC bertumpu pada dukungan publik. Sampai saat ini ABC tetap menolak iklan sehingga programnya akan tetap mengacu pada kepentingan public yang lebih luas dan tidak mengejar *rating* sehingga dengan demikian tidak mengorbankan integritasnya.
- d) Dalam pertemuan ini menyetujui bahwa media televisi publik sangat penting dalam pengembangan saling pemahaman, kerjasama, dan hubungan antara masyarakat kedua negara. Selanjutnya Radio ABC memiliki jangkauan yang luas melalui kemitraan dengan perusahaan radio publik dan telephone genggam di negara lain. Peranan pemerintah hanya pada penyediaan anggaran dan penunjukan chairman serta memberikan masukan akan tetapi tidak campur tangan

dalam manajemen dan program serta isinya. Di jelaskan kemandirian ABC bersumber pada filosofi bahwa *ABC does not belong to the government of today but to the people*, oleh karena itu, ABC menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada parlemen bukan kepada pemerintah.

- d) Selanjutnya, bentuk kerjasama ABC dengan TVRI dan RRI adalah dalam bentuk kemitraan antara *broadcaster to broadcaster*, ABC juga dapat memberikan pelatihan khususnya penggunaan teknologi baru, kemungkinan dalam memberikan jasa konsultasi kepada TVRI, yang tentunya TVRI dan RRI dapat menghubungi ABC setelah mengidentifikasi hal-hal yang kiranya perlu dilakukan kerjasama.

2. Pertemuan dengan Mr. Georgie Mc Clean, *Manager Policy and Research*, SBS Television, tanggal 22 Juni 2010

- a) Pertemuan diskusi dengan para pengurus yang menjelaskan mengenai landasan filosofi pembentukan SBS untuk memberikan *special multilingual broadcasting service for ethnic communities* di Australia. Slogan SBS yaitu *Six Billion Stories and Counting* merupakan cerminan mandat dan visi SBS untuk memberikan ruang bagi semua insan untuk menyampaikan 'ceritanya (ide)' dalam Australia yang multikultur. Sama seperti *ABC Board of Director* ditunjuk oleh pemerintah akan tetapi SBS sepenuhnya memiliki independensi yang diatur oleh secara jelas dalam piagamnya terkait klasifikasi program, iklan dan sponsor, ketepatan, kenetralan dan keseimbangan dalam berita dan isu kontemporer. Berbeda dengan ABC yang tidak memiliki iklan, SBS mendapatkan sebagian anggarannya dari iklan yang secara ketat dibatasi hanya 5 (lima) menit per jam tayangan. Radio SBS mulai beroperasi pada tahun 1975 dan lima tahun kemudian diikuti televisi SBS. Walaupun programnya dan jaringannya luas, SBS hanya didukung oleh 800 personil di seluruh Australia yang utamanya berbasis di Sydney dan Melbourne. Sejalan dengan misinya dalam mendukung Australia yang multikultur, para personilnya juga mewakili lebih dari 100 latar belakang etnis termasuk dalam penyiaran siaran televisi dan radio berbagai bahasa etnis di Australia yang sehari umumnya berjumlah 2000 berita.
- b) Lebih lanjut merespon pertanyaan dari Komisi I, SBS menjelaskan tidak memiliki program untuk anak-anak akan tetapi lebih difokuskan pada kelompok migran dewasa dan komunitas untuk membantu mereka dapat berasimilasi dengan '*Australian way*' termasuk bahasa inggris tanpa kehilangan kekayaan etnis dan budayanya. Meskipun

diperbolehkan menerima iklan namun secara tegas disampaikan bahwa prioritas SBS adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan komersil. Rating program SBS secara umum cukup baik dan dengan menjadi pemegang hak siaran piala dunia untuk 3 (tiga) kali berturut-turut rating SBS meningkat tajam.

3. Pertemuan dengan Konjen RI dan Staf serta Masyarakat Indonesia di Sydney, tanggal 22 Juni 2010

- a. Dalam pertemuan di Wisma RI Sydney dengan Konjen RI, Staf, serta masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang bedomisili di Sydney membahas isu-isu aktual dalam hubungan kedua negara, maksud dan tujuan dari kunjungan dinas Delegasi Komisi I DPR ke Canberra dan Sydney termasuk saran dan masukan masyarakat mengenai perlunya mengatasi hambatan ekspor produk pertanian Indonesia ke Australia yang tentunya dapat di sampaikan kepada Komisi IV yang membidangi permasalahan tersebut.
- b. Dalam pertemuan dengan Masyarakat Indonesia di Sydney yang dihadiri oleh sekitar 100 orang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Australia berlangsung baik dan positif bagi pengembangan kerjasama antar parlemen (*P-to-P*) dalam mendukung upaya-upaya di tingkat pemerintah kedua negara dalam meningkatkan hubungan bilateral.
2. Di berbagai pertemuan, semua pihak mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara khususnya kunjungan Presiden RI yang sangat bermakna bagi pemerintah dan masyarakat Australia, serta menindaklanjuti kunjungan Ketua Komisi I DPR RI sebelumnya dibulan Maret 2010.
3. Pemerintah dan Parlemen Australia memandang penting kunjungan kerja ini yang tampak dari perlakuan yang hampir sama dengan delegasi yang diundang parlemen Australia termasuk dalam undangan makan malam dari *Speaker* dan Presiden Senat.
4. Delegasi Komisi I DPR diberbagai kesempatan bertemu dengan beberapa anggota parlemen dan pejabat terkait Australia, membicarakan isu-isu yang menghambat atau berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara termasuk mencari solusi atas permasalahannya, serta mencari langkah-langkah yang bermanfaat bagi kepentingan kedua negara.

B. SARAN

1. Mengingat tingginya atensi dari para anggota parlemen Australia atas kehadiran Delegasi Komisi I DPR RI hal ini mencerminkan tingginya komitmen baik pemerintah maupun parlemen Australia dalam memanfaatkan hubungan bilateral kedua negara ke arah yang lebih baik. Kiranya perhatian tersebut juga perlu ditindaklanjuti dengan melanjutkan program mengundang beberapa anggota Parlemen Australia ke Indonesia.

C. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Dinas Delegasi Komisi I DPR RI ke Australia dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara, khususnya kedua Parlemen. Diharapkan hasil kunjungan tersebut dapat memberikan masukan dan kontribusi kepada DPR RI dalam upaya memperkuat hubungan antara DPR RI - Parlemen Australia.

Jakarta, Juni 2010

Ketua Delegasi,

HAYONO ISMAN

A-450

**SUSUNAN DELEGASI KOMISI I DPR RI KE AUSTRALIA
20-25 Juni 2010**

1. Hayono Isman, S.IP	F-Demokrat	Ketua Delegasi
2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si	F- Demokrat	Anggota Delegasi
3. Max Sopacua, SE, M.Si	F- Demokrat	Anggota Delegasi
4. Paula Sinjal, SH	F- Demokrat	Anggota Delegasi
5. Jeffrie Geovanie	F-Golkar	Anggota Delegasi
6. Ir. Neil Iskandar Daulay	F-Golkar	Anggota Delegasi
7. Drs. H.A. Muchamad Ruslan	F-Golkar	Anggota Delegasi
8. Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, B.Bus	F-Golkar	Anggota Delegasi
9. Ir. Dadoes Soemarwanto, M.Arch	F-PDI Perjuangan	Anggota Delegasi
10. Prof. Dr. Ismet Ahmad	F-PAN	Anggota Delegasi
11. Jaka Adiwiguna, S.Sos	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
12. Agung Permata, S.AP	Set. Komisi I	Sekretariat Del.
13. R. Sakunto Paksi	Kemlu RI	Penasehat Del
14. Meinarti Fauzie	Kemlu RI	Penasehat Del

SUSUNAN JADWAL ACARA KOMISI I DPR RI KE AUSTRALIA 20-25 Juni 2010

1. SENIN, 21 JUNI 2010

- 09.30 : Pertemuan dengan the Hon. Stephen Conroy, *Minister for Broadband, Communications and the Digital Economy*
- 10.15 : Overview of Australian Parliamentary system, Dr. Mark Rodriques (*Senior Researcher Potilics and Public Administration Section*)
- 11.03 : Pertemuan dengan The Hon Greg Combet AM, MP, *Minister for Defence Materiel and Science*
- 12.30 : Makan Siang di Australian National University (ANU), dan *Round-table meeting with staff Pengajar from the Australian National University to discuss Australia-Indonesian relations*
- 16.30 : Call on Mr. Harry Jenkins, MP, *Speaker of the House of Representatives* & Sen. The Hon. John Hogg, *President of the Senate*
- 18.30 : Acara bersama KBRI Canberra (*with all Embassy Homestaffs*)

2. SELASA, 22 JUNI 2010

- 10.00 : Pertemuan dengan Mr. Warren King (Deputy Chief Executive Officer Defence Materiel Organisation)
- 12.00 : Pertemuan dengan Ms. Sharon Grierson, MP, *Chair of the Joint Standing Committee on Public Accounts & Audit*
- 14.00 : *Visit to Question time - Senate*
- 14.30 : *Visit to Question Time - House of Representatives*
- 15.00 : *Interview with Pers of Parliament House (Head of Delegation)*
- 15.30 : Pertemuan dengan *the Joint Standing Committee on Foreign Affairs Defence and Trade*, Chair : Sen. Michael Forshaw, Deputy Chair : the Hon. David Hawker, MP
- 17.30 : Pertemuan dengan Mr. Bernard Wright (*Clerk of the House of Representative*)
- 18.30 : *Dinner hosted by Mr. Harry Jenkins, MP, Speaker of the House of Representatives* & Sen. The Hon. John Hogg, *President of the Senate*

3. RABU, 23 JUNI 2010

- 09.00 : Kunjungan ke Kantor KBRI Canberra
- 10.00 : Perjalanan menuju Sydney
- 12.30 : Makan Siang di Black Swan Restaurant, Old Hume Highway, Berrima town
- 18.30 : Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia, di Sydney

4. KAMIS, 24 JUNI 2010

- 09.50 : Pertemuan dgn ABC TV, Australia & Kunjungan ke fasilitas ABC TV
- 14.00 : Pertemuan dgn SBS TV, Australia & Kunjungan ke fasilitas SBS TV
- 15.30 : *Free Evening*